

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Proses Pemberdayaan Dengan Model Epe
 (Engagement–Participation–Empowerment) dalam Pembangunan
 Infrastruktur Desa di Kabupaten Tegal

Jumlah Penulis : 2 penulis

Status Pengusul : Noor Sofiah, **Sunarti**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Pengembangan Kota
 b. Nomor ISSN : 2337 - 7062
 c. Vol.,no.,bulan,tahun : vol.6 no.1 tahun 2018
 d. Penerbit : Universitas Diponegoro
 e. DOI artikel (jika ada): 10.14710/jpk.6.1.45-55
 f. alamat web jurnal : http://ejournal2.undip.ac.id/index.
 php/jpk/issue/archive
 g. Terindeks di SINTA 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi
 (beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional /Nasional di DOAJ,CABI,
 COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/inter nasional bereputasi <input type="checkbox"/>	Nasional Terakreditasi <input type="text" value="25"/>	Nasional <input type="checkbox"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.5		2,0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.5		5,5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.5		6,0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.5		7,0
Total = (100%)		25		20,5
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- a. Unsur isi cukup lengkap, tetapi tidak ada ucapan terima kasih. Kurang terlihat perbedaan antara data, findings dan discussion yang semuanya tercampur di 3. Hasil dan Pembahasan.
- b. Dalam analisis dan diskusi, banyak statement2 yang tidak didukung dengan eviden2 memadai, yang biasanya berupa statement2 dari para narasumber, sebagaimana biasa dilakukan dalam analisis kualitatif; Didukung oleh 18 pustaka, tetapi hanya 9 (50%) yang dari artikel jurnal.
- c. Metode disebutkan menggunakan kualitatif tetapi juga triangulasi tanpa informasi yang lebih rinci bagaimana hubungan keduanya. Data dari hasil wawancara mendalam, tetapi tidak muncul kutipan2 hasil wawancara sebagai eviden2, sebagaimana biasa dilakukan dalam analisis kualitatif.
- a. Jurnal terakreditasi Sinta 2; Penerbit dari Universitas Diponegoro.

Semarang, 18 Agustus 2020

Reviewer 1,

Prof. Dr. rer.nat. Imam Buchori, S.T.
 NIP. 197011231995121001
 Departemen PWK, FT, Undip

**LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU PEER REVIEW
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH**

Judul karya ilmiah (artikel) : Proses Pemberdayaan Dengan Model Epe
(Engagement–Participation–Empowerment) dalam Pembangunan
Infrastruktur Desa di Kabupaten Tegal

Jumlah Penulis : 2 penulis

Status Pengusul : Noor Sofiah, **Sunarti**

Identitas Jurnal Ilmiah :

- a. Nama Jurnal : Pengembangan Kota
- b. Nomor ISSN : 2337 - 7062
- c. Vol.,no.,bulan,tahun : vol.6 no.1 tahun 2018
- d. Penerbit : Universitas Diponegoro
- e. DOI artikel (jika ada): 10.14710/jpk.6.1.45-55
- f. alamat web jurnal : <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/issue/archive>
- g. Terindeks di SINTA 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional /Nasional di DOAJ,CABI,
COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Maksimal Jurnal Ilmiah			Nilai Akhir Yang Diperoleh
	Internasional/ internasional bereputasi	Nasional Terakreditasi	Nasional	
	<input type="text"/>	<input type="text" value="25"/>	<input type="text"/>	
a. Kelengkapan unsur isi artikel (10%)		2.5		2.0
b. Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)		7.5		5.5
c. Kecukupan dan kemutakhiran data/informasi dan metodologi (30%)		7.5		5.0
d. Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)		7.5		6.0
Total = (100%)		25		18.5
Nilai Pengusul :				

Catatan Penilaian artikel oleh Reviewer :

- a. Artikel cukup lengkap dan sesuai bidang ilmu penulis.
- b. Isi artikel terkait Model Pemberdayaan EPE kurang dibahas secara komprehensif.
- c. Artikel memiliki nilai kebaruan cukup karena hanya 5 (27%) terbitan ≤ 10 tahun terakhir. Turnitin Similarity Index 7%.
- d. Jurnal Pengembangan Kota, Sinta 2, terbitan DPWK UNDIP.

Semarang, 27 Oktober 2020
Reviewer 2,



Prof. Dr. Ir. Nany Yulastuti, M.S.P.
NIP. 195407171982032001
Departemen PWK, FT, UNDIP

LEMBAR
HASIL PENILAIAN SEJAWAT SEBIDANG ATAU *PEER REVIEW*
KARYA ILMIAH : JURNAL ILMIAH

Judul karya ilmiah (artikel) : Proses Pemberdayaan Dengan Model EPE (Engagement-Participation Empowerment) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Tegal

Jumlah Penulis : 2 penulis

Status Pengusul : Noor Sofiah, **Sunarti**

Identitas Jurnal Ilmiah : a. Nama Jurnal : Pengembangan Kota
b. Nomor ISSN : 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online)
c. Vol.,no.,bulan,tahun : Vol.6 no.1 tahun 2018
d. Penerbit : Universitas Diponegoro
e. DOI artikel : <https://doi.org/10.14710/jpk.6.1.45-55>
f. Alamat web jurnal : <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/article/view/2927>
g. Terindeks di SINTA 2

Kategori Publikasi Jurnal Ilmiah : Jurnal Ilmiah Internasional /internasional bereputasi
(beri ✓ pada kategori yang tepat) Jurnal Ilmiah Nasional Terakreditasi
 Jurnal Ilmiah Nasional /Nasional di DOAJ,CABI, COPERNICUS

Hasil Penilaian *Peer Review* :

Komponen Yang Dinilai	Nilai Reviewer		
	Reviewer I	Reviewer II	Nilai Rata-rata
a.Kelengkapan unsur isi artikel (10%)	2,0	2,0	2,0
b.Ruang lingkup dan kedalaman pembahasan (30%)	5,5	5,5	5,5
c.Kecukupan dan kemutahiran data/informasi dan metodologi (30%)	6,0	5,0	5,5
d.Kelengkapan unsur dan kualitas terbitan/jurnal (30%)	7,0	6,0	6,5
Total = (100%)	20,5	18,5	19,5

Semarang, 27 Oktober 2020

Reviewer 1,

Prof. Dr. rer.nat. Imam Buchori, S.T.
NIP. 197011231995121001
Departemen PWK, FT, Undip

Reviewer 2,

Prof. Dr. Ir. Nany Yuliasuti, M.S.P.
NIP. 195407171982032001
Departemen PWK, FT, Undip

SERTIFIKAT

Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi



Kutipan dari Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan,
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
Nomor: 34/E/KPT/2018
Tentang Hasil Akreditasi Jurnal Ilmiah Periode 3 Tahun 2018

Jurnal Pengembangan Kota

E-ISSN: 25030361

Penerbit: Universitas Diponegoro

Ditetapkan sebagai Jurnal Ilmiah

TERAKREDITASI PERINGKAT 2

Akreditasi berlaku selama 5 (lima) tahun, yaitu
Volume 6 Nomor 1 Tahun 2018 sampai Volume 10 Nomor 1 Tahun 2022

Jakarta, 10 Desember 2018

Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan

Dr. Muhammad Dimiyati
NIP. 195912171984021001



JURNAL PENGEMBANGAN KOTA

The review of urban studies and development

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

Volume 6 | Nomor 1 | Hal. 1 – 95 | Juli 2018



ISSN : 2503-0361 (online), 2337-7062 (print)

Diterbitkan oleh:



UNIVERSITAS
DIPONEGORO

Journal Profile

Jurnal Pengembangan Kota

eISSN : 25030361 | pISSN : 25030361

Engineering
Universitas Diponegoro



S2
Sinta Score



9
H-Index

9
HS-Index

333
Citations

331
5 Year Citations



Penerbit:
Universitas Diponegoro

Website | Editor URL

Address:
JURNAL PENGEMBANGAN KOTA (JPK),
Research Group on Urban Studies and
Development, Department of Urban and
Regional Planning, Building A 2nd Floor,
Jln. Prof. Soedarto, SH. Tembalang-
Semarang

Email:
jpk.labkota@live.undip.ac.id

Phone:
(024) 7460054

Last Updated :
2021-03-02



Search... 1 2 3 4 5

Page 1 of 9 | Total Records : 82

Publications	Citation
Faktor-faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Tambarana Kecamatan Poso Pesisir Utara Kabupaten Poso MR Napirah, A Rahman, A Tony Jurnal Pengembangan Kota 4 (1), 29-39	59
Kapasitas Kelembagaan Dalam Pengembangan Desa Wisata (Studi Kasus: Desa Wisata Ketenger, Banyumas) GR Prafitri, M Damayanti Jurnal Pengembangan Kota 4 (1), 76-86	33
Strategi Kota Pekalongan dalam pengembangan wisata kreatif berbasis industri batik M Damayanti, L Latifah Jurnal Pengembangan Kota 3 (2), 100-111	28
Tingkat kerentanan masyarakat terhadap bencana banjir di Perumnas Tlogosari, Kota Semarang RP Danianti, S Sariffuddin Jurnal Pengembangan Kota 3 (2), 90-99	16
Pola dan faktor perkembangan pemanfaatan lahan di Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak DR Putra, W Pradoto Jurnal Pengembangan Kota 4 (1), 67-75	13
Kajian Pemanfaatan Ruang Kegiatan Komersial Koridor Jalan Taman Siswa Kota Semarang IW Wardhana, R Haryanto Jurnal Pengembangan Kota 4 (1), 49-57	12
Bentuk Morfologi Kawasan Permukiman Urban Fringe Selatan Kota Surakarta MA Putri, MJ Rahayu, RA Putri Jurnal Pengembangan Kota 4 (2), 120-128	11
Kajian partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sanitasi berbasis masyarakat (PSBM) di Kelurahan Mangunharjo, Semarang IK Adi, M Rahdriawan Jurnal Pengembangan Kota 4 (2), 151-159	10
Evaluasi Pemanfaatan Air Bersih Program PAMSIMAS Di Kecamatan Tembalang N Fitriyani, M Rahdriawan Jurnal Pengembangan Kota 3 (2), 80-89	10
Potensi Pengembangan Wisata Sepeda di Kota Bandung Berdasarkan Persepsi dan Preferensi Wisatawan D Aquaria, A Rosyidie, WD Pratiwi Jurnal Pengembangan Kota 4 (1), 14-20	7

Page 1 of 9 | Total Records : 82 1 2 3 4 5



FOKUS DAN LINGKUP JURNAL

Jurnal Pengembangan Kota (JPK) ISSN : 2503-0361 (online), 2337-7062 (print) adalah *peer-reviewed journal* yang menerbitkan artikel-artikel ilmiah bidang kajian perkotaan dan pembangunan (*urban studies and development*). Berbagai topik yang dapat diterbitkan melalui jurnal ini, meliputi:

- Perumahan dan kawasan permukiman;
- Aplikasi SIG untuk pengembangan perkotaan;
- Transportasi perkotaan;
- Pengembangan pariwisata kota;
- Kajian lingkungan perkotaan;
- Pengembangan sosial/ekonomi masyarakat perkotaan;
- Pertanian perkotaan;
- Manajemen properti;
- Bencana perkotaan; dan
- Bidang lainnya yang relevan.

Artikel-artikel yang diterbitkan di Jurnal Pengembangan Kota meliputi hasil penelitian ilmiah asli (prioritas utama), artikel ulasan ilmiah (*review article*) yang bersifat baru dan komprehensif, atau komentar dan kritik atas tulisan yang ada di jurnal pengembangan kota. JPK menerima manuskrip atau artikel dalam bidang kajian perkotaan dan pembangunan dari berbagai kalangan akademisi, peneliti maupun praktisi baik nasional maupun internasional. Seluruh artikel yang dimuat di Jurnal Pengembangan Kota adalah artikel yang telah melalui proses penelaahan oleh Mitra Bebestari (peer-reviewers).



Jurnal Pengembangan Kota diterbitkan oleh Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro dibawah lisensi Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Cover. Foto Umbul Sidomukti, diambil pada Tahun 2017. **Photo Credits:** Ershad Ghani Al Karim (cover)

INFORMASI INDEKSASI JURNAL

Jurnal Pengembangan Kota (JPK), <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk/> telah terindeks di beberapa pengindeks bereputasi, antara lain : Crossref, Indonesian Publication Index (IPI), Google Scholar, Microsoft Academic Search, BASE (Bielefeld Academic Search Engine) dan WorldCat.



ALAMAT REDAKSI JURNAL PENGEMBANGAN KOTA

Laboratorium Pengembangan Kota



Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro
Gedung A Lantai 2, Kampus PWK,
Jl. Prof. Soedarto, SH Tembalang, kota Semarang, Indonesia

Email: jpk.labkota@live.undip.ac.id Homepage: <http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

TIM PENYUNTING

KETUA PENYUNTING

Maya Damayanti, PhD, Universitas Diponegoro,
INDONESIA
Scopus ID: 57194197911
email: maya.damayanti@gmail.com

DEWAN PENYUNTING

Dr. D. Ary Adriansyah Samsura, Radboud University,
NETHERLANDS
Scopus ID: 33068245800

Dr. Bevaola Kusumasari, Universitas Gadjah Mada,
INDONESIA
Scopus ID: 36460064500

Dr.-Ing. Asnawi Manaf, Universitas Diponegoro,
INDONESIA
Scopus ID: 55618229300

Dr. Deden Rukmana, Savannah State University,
UNITED STATES
Scopus ID: 12646633400

Dr. Ibrahim Djamaluddin, Universitas Hasanuddin,
INDONESIA
Scopus ID: 84973861219

Dr. Teuku Afrizal, University Malaysia Sabah,
MALAYSIA
Scopus ID: 55875466800

Dr. Hadi Wahyono, Universitas Diponegoro,
INDONESIA
Scopus ID: 57193388457

SECTION EDITORS

Sariffuddin, ST, MT, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, INDONESIA

Lutfiyatul Wahdah, ST, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, INDONESIA

Lillah Haulah, SPWK, Departemen Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Diponegoro, INDONESIA

DAFTAR ISI

FOKUS DAN LINGKUP JURNAL i
TIM PENYUNTING ii
DAFTAR ISI iii

Artikel Ilmiah

KAJIAN IDENTIFIKASI KOTA AMAN (SAFECITY) di SEMARANG
Eko Setiawan, Holi Bina Wijaya 1-8

KAPASITAS PEMERINTAH KOTA BANDUNG DALAM PENYEDIAAN TAMAN TEMATIK GUNA MEWUJUDKAN
KOTA LAYAK HUNI
Rani Widyahantari, Iwan Rudiarto..... 9-16

FUNGSI RUMAH SEBAGAI TEMPAT USAHA BIDANG PARIWISATA DI DESA COLO, KUDUS
Deny Aditya Puspasari, Maya Damayanti..... 17-25

PENGENDALIAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN SKALA KECIL TAK BERIZIN DI KAWASAN LINDUNG
PAMURBAYA
Siti A'isyah, Asnawi Manaf..... 26-34

PELIBATAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN PERMUKIMAN KAMPUNG NELAYAN
Diana Kristina, Wido Prananing Tyas..... 35-44

**PROSES PEMBERDAYAAN DENGAN MODEL EPE (ENGAGEMENT–PARTICIPATION–EMPOWERMENT) DALAM
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN TEGAL**
Noor Sofiah, Sunarti Sunarti..... 45-55

PENILAIAN SAFETY DRIVING PADA BUS RAPID TRANSIT (BRT) KORIDOR 6 DI KOTA SEMARANG UNTUK
MEWUJUDKAN TRANSPORTASI YANG BERKELANJUTAN
Birta Nino Tanayo, Yudi Basuki 56-65

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN
BELITUNG
Bambang Winarno 66-74

PENGEMBANGAN POTENSI PERTANIAN PERKOTAAN DI KAWASAN SUNGAI PALU
Wildani Pingkan S. Hamzens, Meidy Widayanto Moestopo 75-83

STRATEGI INTEGRASI SISTEM TRANSPORTASI UMUM DALAM MENUNJANG PARIWISATA KOTA
YOGYAKARTA
Gilang Rizki Ramadhan, Imam Buchori..... 84-95

Informasi Dewan Penyunting

INDEX PENULIS
INDEX SUBYEK
INFORMASI PENERBITAN

PENGEMBANGAN POTENSI PERTANIAN PERKOTAAN DI KAWASAN SUNGAI PALU

Jurnal Pengembangan Kota (2018)

Volume 6 No. 1 (75-83)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.6.1.75-83

Wildani Pingkan S. Hamzens^{1*}, Meidy Widayanto Moestopo²

¹Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Tadulako

²Konsultan Arsitektur, Perencanaan Wilayah dan Kota

Abstrak. Pengembangan pertanian perkotaan di Kawasan Sungai Palu merupakan isu yang menarik. Hal ini terkait adanya keinginan Pemerintah Kota Palu untuk mengembangkan Kota Palu menjadi Kota Hijau. Selain itu, kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus di Kota Palu kelak akan menyebabkan peningkatan jumlah penduduk dan peningkatan kebutuhan pangan bagi warga Kota Palu. Kawasan Sungai Palu merupakan salah satu lokasi potensial untuk pengembangan pertanian perkotaan, sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk pengembangan potensi pertanian perkotaan di kawasan ini. Penelitian ini termasuk penelitian survei, dan fenomena yang berlangsung menjadi data utama yang diolah untuk analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif berdasarkan hasil observasi. Hasil penelitian memperlihatkan upaya-upaya yang perlu dilakukan meliputi konsolidasi tanah; penetapan jenis aktivitas; perekrutan pelaksana dan pembinaan sumber daya manusia; penyiapan prasarana dan sarana; dan manajemen berkelanjutan.

Kata kunci: pengembangan; pertanian perkotaan; sungai; berkelanjutan; Kota Palu

[Title: Development of Urban Farming in Palu River Area]. *The development of urban farming in Palu River Area is an interesting issue. The initial interest to conduct this research was inspired by Palu Municipality willingness to promote the Palu City as a Green City. In addition, the presence of the Special Economic Zone in Palu that will lead to an increase in the city population, would be an opportunity to produce the urban food crops. Palu River Area is one of potential site to grow an urban agriculture. The purpose of this research is to identify efforts to develop urban farming based on its potencies. This paper is based on a survey research with descriptive analysis as the technique to analyze observation results. This research found that in order to develop urban farming in this area, it needs (1) land consolidation; (2) determination of activity types; (3) recruitment of field person and human resource development; (4) infrastructure and facilities preparation; and (5) sustainable management.*

Keyword: development; urban agriculture; river; sustainable; Palu City

Cara mengutip: Hamzens, W. P. S & Moestopo, M. W. (2018). Pengembangan Potensi Pertanian Perkotaan di Kawasan Sungai Palu. **Jurnal Pengembangan Kota**. Vol 6 (1): 75-83. DOI: 10.14710/jpk.6.1.75-83

1. PENDAHULUAN

Pertanian perkotaan merupakan aktivitas yang berorientasi pada terwujudnya kemudahan pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari bagi masyarakat kota. Selain itu, kehadiran aktivitas pertanian perkotaan juga membantu pemenuhan dan penambahan luasan Ruang Terbuka Hijau Kota. Karenanya, aktivitas pertanian perkotaan harus tertuang dalam dokumen Rencana Tata Ruang Kota, sehingga penyelenggaraannya merupakan bagian dari implementasi Rencana Tata Ruang Kota tersebut.

Pada visi kota tentang masa depan, pertanian perkotaan telah lama dianggap sebagai bagian integral dari 'kota berkelanjutan' (Pollard, Ward, & Roetman, 2018). Hal yang sama juga disampaikan oleh Haberman dkk. (2014), bahwa menumbuhkan

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

*Email: pingkan2hz@gmail.com

Diterima 22 Mei 2018, disetujui 30 Juni 2018

EVALUASI PROGRAM PENYEDIAAN RUMAH LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BELITUNG

Jurnal Pengembangan Kota (2018)

Volume 6 No. 1 (66-74)

Tersedia online di:

<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>

DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-74

Bambang Winarno

Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Belitung

Abstrak. Permasalahan pemenuhan rumah bagi masyarakat miskin merupakan hal rumit karena faktor ekonomi, kurangnya partisipasi pengembang dalam penyediaan rumah, tidak menarik dari sisi bisnis, dan ketidakmampuan berusaha karena usia penghuni. Pemerintah sebagai fasilitator penyediaan perumahan yang layak huni bertanggung jawab atas hal tersebut, sehingga muncul pertanyaan bagaimana penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin? Tujuan penelitian adalah mengevaluasi penyediaan rumah layak huni di Kabupaten Belitung. Hal ini penting untuk mengetahui kesesuaian sasaran program dan mekanisme bantuan bagi masyarakat miskin. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, melalui penjelasan suatu fenomena secara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat miskin di Kabupaten Belitung sesuai sasaran, namun perlu dilakukan penelitian lanjutan terkait pengelolaan rumah layak huni pasca pembangunan.

Kata Kunci: evaluasi; rumah layak huni; masyarakat miskin

[Title: Evaluation of Liveable Housing Program for Poor Society in Belitung Regency]. Housing provision for the poor is a complicated issue due to their economic factors, the lack participation from the developer in housing procurement, unattractive from the business side and unproductive due to the elderly. Since the provision of liveable housing is facilitated by the government, then it arises question of "how is the suitability of liveable housing provision for the poor society?" The purpose of this research is to evaluate liveable housing program in Belitung Regency. It is important to know the suitability of the program based on its objectives and the assistance mechanisms for the poor society. Qualitative descriptive was applied as the research method through the in depth explanation of a phenomenon. The results showed that the provision of liveable housing for the poor in Belitung Regency is suitable based on its target, but it is necessary to do further research related to its post-development management.

Keyword: evaluation; residential homes; poor people

Cara mengutip: Winarno, B. (2018). Skema Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Belitung. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6 (1): 66-74. DOI: 10.14710/jpk.6.1.66-74

1. PENDAHULUAN

Bermukim di perkotaan memberi harapan besar dibandingkan perdesaan karena adanya kelengkapan fasilitas kota (Bernstein, Altbeker, & Storme, 2014), namun dianggap tidak berkelanjutan karena bersifat konsumtif, penghasil limbah dan pemanasan global (van der Heijden, 2017). Secara ekonomi dan finansial tinggal di permukiman kumuh perkotaan merupakan pilihan bagi masyarakat miskin (Turok & Borel-Saladin, 2016). Hal tersebut dipicu adanya migrasi masyarakat desa ke kota, tekanan ekonomi, kebijakan politik, dan konflik social (United Nation, 2017), dan umumnya perkampungan kumuh merupakan hasil pertumbuhan nonformal

perkotaan, ilegal dan tidak terencana (Ragheb, El-Shimy, & Ragheb, 2016). Sedangkan (Havel, 1957) menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kehidupan yang layak baik secara fasilitas, ekonomi dan hukum.

Kepemilikan rumah erat kaitannya terhadap lingkungan sosial dan ekonomi penghuninya

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

Email: winarno_bambang@yahoo.co.id

Diterima 7 Mei 2018, disetujui 7 Juni 2018

PROSES PEMBERDAYAAN DENGAN MODEL EPE (ENGAGEMENT- PARTICIPATION- EMPOWERMENT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN TEGAL

Submission date: 19-Mar-2020 03:25PM (UTC+0700) *by Sunarti Sunarti*

Submission ID: 1278044799

File name: Proses_Pemberdayaan_Dengan_Model_Epe.pdf (574.43K)

Word count: 4781

Character count: 31989

PROSES PEMBERDAYAAN DENGAN MODEL EPE (ENGAGEMENT–PARTICIPATION–EMPOWERMENT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN TEGAL

Jurnal Pengembangan Kota (2018)
Volume 6 No. 1 (45–55)
Tersedia online di:
<http://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpk>
DOI: 10.14710/jpk.6.1.45-55

Noor Sofiah*, Sunarti

Magister Pembangunan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik,
Universitas Diponegoro

Abstrak. PPIP merupakan salah satu program pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat. Meskipun dalam setiap program berbasis pemberdayaan sudah ada pedoman pelaksanaannya, namun pada pelaksanaan kegiatan PPIP di Kabupaten Tegal, terdapat perbedaan proses pemberdayaan antardesa satu dengan lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement–Participation–Empowerment*) pada PPIP di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan pendekatan studi multi kasus. Peneliti mengambil dua kasus pada dua lokasi berdasarkan topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah perdesaan di pegunungan (Desa Dukuhbenda) dan daerah perkotaan di daerah dataran rendah (Desa Slawi Kulon). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa berdasarkan analisis dengan model EPE diketahui pada Desa Dukuhbenda (perdesaan) proses pemberdayaan berproses secara linier sesuai tahapannya. Sedangkan pada Desa Slawi Kulon (perkotaan) proses pemberdayaan berproses tidak sesuai dengan tahapannya, fase pemberdayaan terputus pada fase partisipasi.

Kata kunci: pemberdayaan masyarakat; endogen; eksogen; pembangunan infrastruktur

[Title: Empowerment Process with EPE (Engagement-Participation-Empowerment) Model to Develop Village Infrastructure in Tegal Regency]. PPIP is one of community empowerment-based infrastructure development program. Although in each empowerment-based program there are guidelines for implementation, but in the implementation of PPIP activities in Tegal regency, there are different processes of empowerment among the villages. This study aims to examine the empowerment process associated with the empowerment process of EPE (Engagement-Participation-Empowerment) model in PPIP in Tegal Regency. This research applied qualitative research methods of multi-case studies. The researchers took two cases in two locations based on the topography of the region, which are the location in rural areas in the mountains (Dukuhbenda Village) and urban areas in the lowlands (Slawi Kulon Village). The results of this study indicate that based on the analysis with EPE model known in Dukuhbenda (rural) empowerment process is linear according to its phases. While in Slawi Kulon (urban), the empowerment process is disconnected in the phase of participation.

Keywords: community empowerment; endogenous; exogenous; infrastructure development

Cara mengutip: Sofiah, N., & Sunarti. (2018). Proses Pemberdayaan dengan Model EPE (*Engagement–Participation–Empowerment*) dalam Pembangunan Infrastruktur Desa di Kabupaten Tegal. *Jurnal Pengembangan Kota*. Vol 6 (1): 45-55. DOI: 10.14710/jpk.6.1.45-55

1. PENDAHULUAN

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, paradigma pembangunan di Indonesia telah mengalami perubahan yang signifikan, dari pembangunan yang bertumpu pada negara menjadi paradigma pembangunan yang bertumpu pada masyarakat. Dua dekade terakhir, dapat dilihat minat dalam partisipasi masyarakat di berbagai tingkat pemerintahan,

mulai dari pergeseran global menuju keterlibatan masyarakat dalam pembangunan terus

ISSN 2337-7062 (Print), 2503-0361 (Online) © 2018

This is an open access article under the CC-BY-NC-ND license (<http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>). – lihat halaman depan © 2018

*Email: noosofi.ela@gmail.com

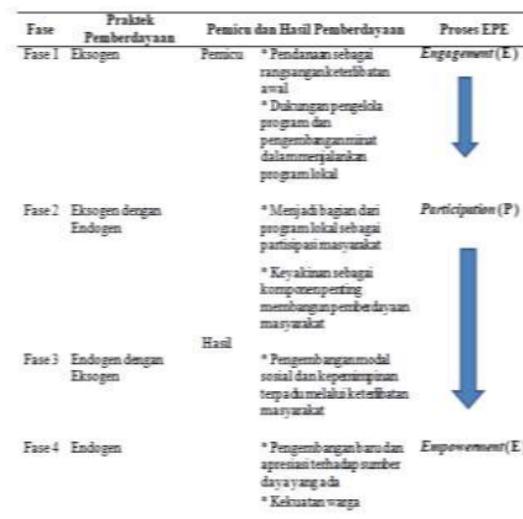
Diterima 4 Mei 2018, disetujui 20 Juni 2018

dikembangkan (United Nations, 2008). Kebijakan yang muncul berupa program yang dimaksudkan untuk dipimpin dan dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri yang bertujuan untuk mengembangkan masyarakat lokal agar memiliki kemampuan untuk berhasil merespon perubahan dan menemukan solusi lokal terhadap masalah lokal yang mereka hadapi (Bradley, 2014). Melalui program pemberdayaan masyarakat, negara dapat mengatur dan memobilisasi partisipasi aktif masyarakat karena partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam membangun masyarakat dengan menciptakan konstituen yang lebih kuat dan memberi lebih banyak akses ke sumber daya yang tersedia (Foster-Fishman, Pierce, & Van Egeren, 2009).

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya merupakan proses perubahan yang terencana. Adanya suatu perencanaan program pemberdayaan masyarakat akan memberikan kerangka kerja yang dapat dijadikan acuan oleh semua stakeholder (termasuk warga masyarakatnya) untuk mengambil keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang seharusnya dilaksanakan demi tercapainya tujuan pembangunan yang diinginkan (Mardikanto & Soebiato, 2012). Untuk memahami bagaimana proses pemberdayaan dipahami dan diwujudkan pada tingkat komunitas, Steiner dan Farmer (2017) merekomendasikan sebuah model yang disebut model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*). Model EPE ini menyoroti bahwa sebuah proses pemberdayaan masyarakat dimulai dengan keterlibatan (*engagement*) kemudian diikuti oleh partisipasi (*participation*), yang keduanya menjadi prasyarat untuk mengembangkan masyarakat yang berdaya (*empowerment*). Model ini terdiri dari empat tahap terkait praktek pemberdayaan masyarakat endogen dan eksogen. Pemberdayaan endogen dan eksogen adalah istilah yang diterapkan tentang sejauh mana anggota masyarakat memiliki kemampuan dan kemauan untuk menjalankan program masyarakat yang ditujukan untuk pembangunan daerah (Margarian, 2011).

Model EPE menyajikan proses pemberdayaan masyarakat secara linier, namun prosesnya dapat terputus pada fase-fasenya (Steiner & Farmer,

2017). Selain itu, proses pengalihan wewenang kepada masyarakat tidak begitu saja terjadi secara langsung, ada banyak ancaman dan tantangan di sepanjang jalan (Skerratt & Steiner, 2013). Empat fase dalam model EPE menunjukkan proses pemberdayaan masyarakat secara bertahap (lihat Gambar 1). Sifat dan tingkat keterlibatan berbagai pemangku kepentingan bervariasi dalam setiap fase. Sebuah program pemberdayaan bisa gagal pada fase apapun, sehingga kemudian sebuah inisiatif tidak terselesaikan.



Gambar 1. Fase Pemberdayaan Model EPE (Steiner & Farmer, 2017)

Salah satu program yang menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat di Indonesia adalah Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (PIIP). Fokus utama program ini adalah (i) pengembangan masyarakat; (ii) pembangunan serta peningkatan infrastruktur pedesaan; dan (iii) peningkatan peran stakeholder dan pemerintah daerah (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2014). Program ini telah dilaksanakan di Kabupaten Tegal sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 2014-2015, Kabupaten Tegal mendapatkan 14 (empat belas) desa penerima program yang tersebar di 10 (sepuluh) kecamatan. Kegiatan pembangunan infrastruktur dalam program ini direncanakan oleh masyarakat dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat secara

swakelola dan tidak boleh dikontraktualkan. Hasil infrastruktur terbangun harus dipelihara sendiri oleh masyarakat melalui Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP). Model program partisipatif dengan melibatkan peran aktif masyarakat seperti ini harapannya adalah dapat memperoleh hasil yang berkualitas tinggi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memastikan pengelolaan yang lebih inklusif serta lebih besar ekuitas dalam pembagian keuntungan (Mansuri & Rao, 2012).

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya di Swedia yang menggunakan model EPE untuk mengeksplorasi dinamika masyarakat pedesaan. Pada penelitian tersebut, desa-desa sebagai studi kasus dianggap memiliki karakteristik yang sama, terutama terkait dengan karakteristik penduduknya (Steiner & Farmer, 2017). Dengan pertimbangan bahwa proses pemberdayaan masyarakat akan beragam pada tiap desa. Penelitian ini mengambil 2 kasus desa di Kabupaten Tegal yang berada pada wilayah geografis yang berbeda, yaitu di pegunungan dan di daerah dataran rendah.

Berdasarkan data program PPIP di Kabupaten Tegal, partisipasi masyarakat desa di daerah pegunungan diperkirakan lebih besar dibandingkan partisipasi masyarakat di dataran rendah perkotaan. Hal ini dapat dilihat dari perbedaan nilai swadaya pada desa-desa di kedua lokasi tersebut. Seperti yang diperlihatkan pada Desa Dukuhbenda yang berada di daerah pegunungan dengan nilai swadaya yang paling tinggi dengan nominal Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pada tahun 2014 dan Rp. 13.180.000,00 (tiga belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) pada tahun 2015. Dibandingkan dengan Desa Slawi Kulon yang terletak di daerah dataran rendah tepatnya di wilayah Kecamatan Slawi yang merupakan ibukota Kabupaten Tegal, nominal swadaya masyarakatnya hanya sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada tahun 2014 dan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) pada tahun 2015. Selain itu setelah program berakhir, terjadi perbedaan antusiasme masyarakat dalam memelihara hasil infrastruktur terbangun. Di Desa Dukuhbenda, masyarakat masih memiliki kemauan untuk memelihara dengan melakukan pembersihan dan kerja bakti

serta memperbaiki jika ada kerusakan secara spontanitas. Namun di Desa Slawi Kulon kegiatan pemeliharaan tidak dilakukan. Perbedaan tingkat partisipasi dan pengelolaan hasil pembangunan ini menggambarkan proses pemberdayaan yang terjadi di kedua desa berbeda. Muncul pertanyaan “mengapa terjadi perbedaan proses pemberdayaan di desa daerah pegunungan dan perkotaan? Apa faktor-faktor yang mempengaruhi?”

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji proses pemberdayaan dikaitkan dengan proses pemberdayaan model EPE (*Engagement-Participation-Empowerment*) pada Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami suatu persoalan yang berhubungan dengan masalah sosial, atau dalam usaha mengurai kompleksitas suatu persoalan melalui cara pandang induktif dari tema khusus ke tema yang lebih umum (Creswell, 2014; Sugiyono, 2013). Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Peneliti mengambil dua kasus pada dua lokasi yang dapat mewakili perbedaan karakteristik masyarakat berdasarkan topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah perdesaan di pegunungan dan daerah perkotaan di daerah dataran rendah. Kasus lebih dari satu dapat digunakan sebagai pembandingan atau saling melengkapi. Penelitian yang menggunakan kasus lebih dari satu menurut Yin (2014) termasuk dalam jenis studi multi kasus.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer yang berasal dari narasumber, juga menggunakan data sekunder sebagai pendukung bersumber dari dokumen dan laporan-laporan serta studi yang telah dilakukan sebelumnya. Dalam penelitian ini sebagai narasumber adalah *stakeholder* yang terlibat

secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan PPIP. Jumlah narasumber dalam penelitian ini bersifat fleksibel tidak dibatasi, jika dari hasil *snowballing* ternyata dibutuhkan *stakeholder* lain selain hasil literatur agar informasi lebih utuh, tidak menutup kemungkinan untuk ditambah. Atau sebaliknya, jika ada *stakeholder* ²nyatakan tidak relevan maka akan dieliminasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan dan studi dokumentasi dengan pengujian keabsahan data menggunakan metode Triangulasi.

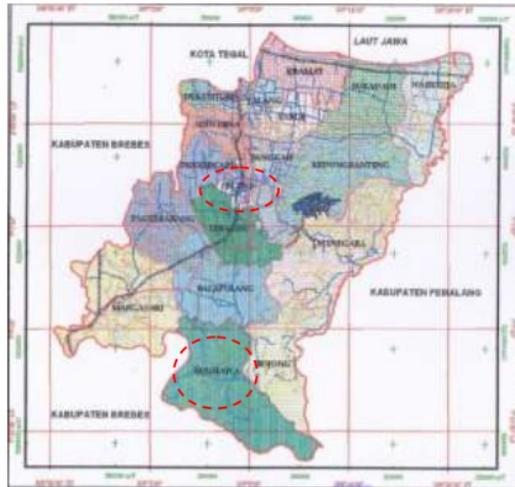
Analisis data dilakukan dengan cara melakukan identifikasi *stakeholder* yang terlibat dalam PPIP terlebih dahulu dengan mengelompokkannya sesuai perannya kemudian dilanjutkan dengan menganalisis proses pemberdayaan dalam setiap tahapan PPIP dengan menggunakan empat fase pemberdayaan dalam model EPE (*Engagement – Participation – Empowerment*) sesuai model yang direkomendasikan oleh Steiner dan Farmer (2017).

¹

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum

Kabupaten Tegal merupakan salah satu daerah kabupaten di Provinsi Jawa Tengah dengan ibukota Slawi dengan luas wilayah 878,79 km². Wilayah administrasi Kabupaten Tegal terdiri dari 18 wilayah kecamatan dengan luas kecamatan terbesar yaitu Kecamatan Bumijawa dengan luas 88,55 km² atau sebesar 10,08% luas wilayah kabupaten, dan luas terkecil yaitu Kecamatan Slawi 13,83 km² atau sebesar 1,55% luas Kabupaten Tegal. Lokasi penelitian berada pada dua lokasi yang dapat mewakili perbedaan karakteristik masyarakat berdasarkan topografi wilayahnya yaitu lokasi di daerah perdesaan di pegunungan Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa dan daerah perkotaan di daerah dataran rendah Desa Slawi Kulon Kecamatan Slawi (lihat Gambar 2).



Gambar 2. Lokasi Penelitian

Program PPIP merupakan program berbasis pemberdayaan masyarakat yang komponen kegiatannya meliputi fasilitasi dan mobilisasi masyarakat sehingga mampu melakukan identifikasi masalah ketersediaan akses ke infrastruktur dasar, menyusun perencanaan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur dasar. Pada tahun 2014 -2015, program ini didanai melalui dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dengan rincian alokasi dana sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) di tahun anggaran 2014 dilanjutkan pada tahun 2015 dengan alokasi dana Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Jenis infrastruktur yang dibangun di Desa Dukuhbenda Kecamatan Bumijawa adalah rabat beton, talud dan saluran pada tahun 2014, pekerjaan talud dan urug sirtu pelebaran jalan pada tahun 2015. Sedangkan di Desa Slawi Kulon pada tahun 2014, infrastruktur yang dibangun berupa pekerjaan paving untuk permukiman warga, dan tahun 2015 berupa pekerjaan jembatan dan paving.

²

Pelaksanaan PPIP dilaksanakan melalui serangkaian tahapan kegiatan yang saling terkait. Ada 4 tahapan kegiatan di tingkat desa, yaitu (1) tahap persiapan, (2) tahap perencanaan, (3) tahap pelaksanaan fisik, dan (4) tahap pasca pelaksanaan fisik. Penyelenggaraan PPIP melibatkan *stakeholder* dari tingkat pusat sampai dengan tingkat desa, terdiri dari masyarakat

2 num, Organisasi Masyarakat Setempat (OMS), Kelompok manfaat dan Pemelihara (KPP), Kader Desa (KD), Fasilitator Masyarakat (FM), Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK), Tim Ahli Manajemen Provinsi (TAMPr), Konsultan Manajemen Pusat (KMP) dan Tim Koordinasi, Tim Pelaksana (timlak), dan Satker yang berasal dari perangkat pemerintah baik pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, hingga pemerintah pusat.

3.2 Identifikasi Stakeholder

Stakeholder yang terlibat dalam kegiatan PPIP di tingkat kabupaten dan desa berasal dari berbagai latar yang berbeda. Dari sekian banyak *stakeholder* yang terlibat mulai dari tahap persiapan hingga pasca pelaksanaan fisik, dapat diklasifikasikan menjadi tiga kelompok berdasarkan peran masing-masing yaitu *stakeholder* utama, *stakeholder* kunci dan *stakeholder* penunjang menurut Crosby (1991, dalam Iqbal, 2007) seperti ditunjukkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Pengelompokan *stakeholder*

<i>Stakeholder</i> Kunci	<i>Stakeholder</i> Utama	<i>Stakeholder</i> Penunjang
Merupakan inisiator secara legalitas memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan yang terdiri dari instansi pemerintah yang terkait langsung dengan kegiatan PPIP	Merupakan pelaku yang mengimplementasikan kebijakan program dan terkena dampak dari program	Merupakan pihak yang menjadi perantara dalam proses penyampaian program
<ul style="list-style-type: none"> • Satker PIP Kab.Tegal (dari unsur Dinas PU) • Tim Pelaksana Kabupaten (dari unsur Dinas PU) • Tim Koordinasi Kabupaten (terdiri dari beberapa dinas yaitu Bappeda, DPU, Bappermasdes, Bagian Pemerintahan Setda, Bagian Ekbang Setda, DPPKAD, dan Bagian Hukum Setda) 	<ul style="list-style-type: none"> • OMS (Organisasi Masyarakat Setempat) • KPP (Kelompok Pemenfaat Pemelihara) 	<ul style="list-style-type: none"> • Fasilitator Masyarakat • Konsultan Manajemen Kabupaten (KMK) • KD (Kader Desa) • Kepala Desa dan Pemerintah Desa • BPD (Badan Permusyawaratan Desa)

Stakeholder utama, kunci dan penunjang tersebut saling bekerjasama selama proses pemberdayaan dalam kegiatan PPIP. Jika ditinjau dari proses

kegiatan PPIP di kedua desa lokasi penelitian, *stakeholder* yang teridentifikasi relatif sama. Namun antara kedua desa lokasi penelitian, dalam prosesnya beberapa *stakeholder* memiliki peran yang menonjol dan berkontribusi dalam keberhasilan program.

3.3 Analisis Proses Pemberdayaan model EPE dalam tahapan pelaksanaan PPIP

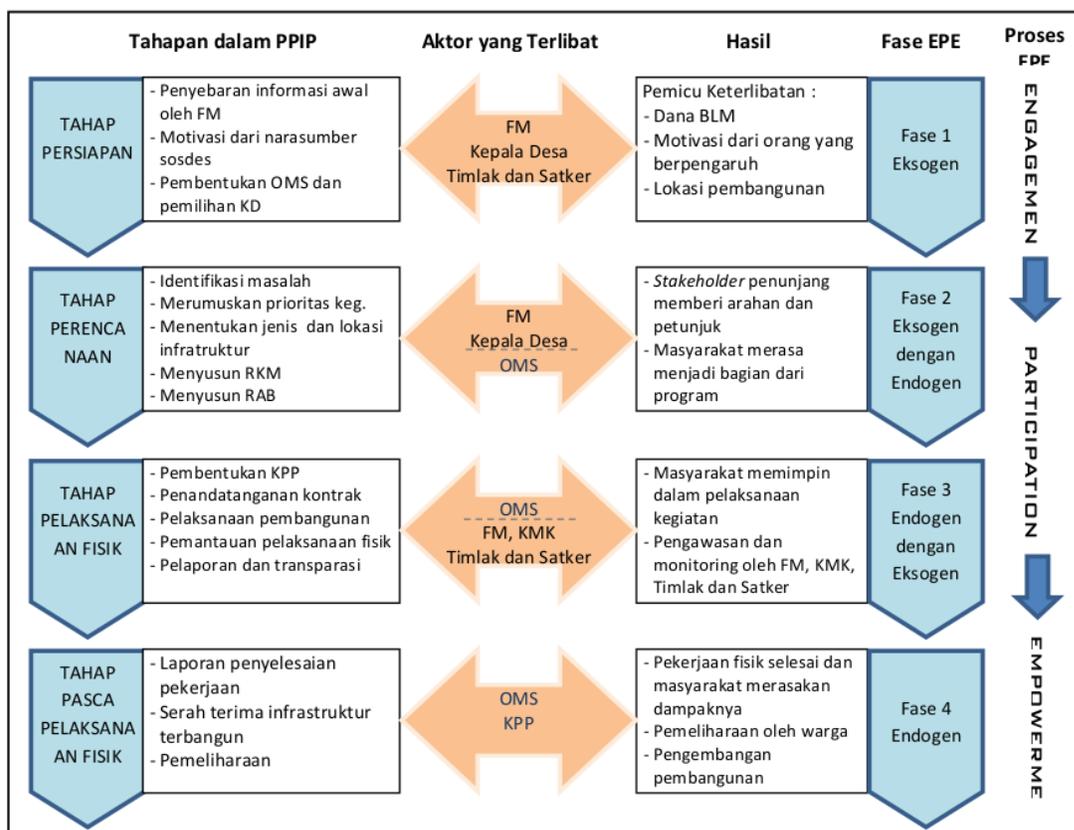
Proses pemberdayaan dalam studi ini menyajikan model *Engagement-Participation-Empowerment* yang menunjukkan tahapan dalam mentransfer kekuasaan dari aktor eksternal (eksogen) untuk masyarakat lokal (endogen). Endogen berarti tumbuh atau berasal dari dalam, memiliki penyebab atau asal internal. Pemberdayaan endogen berkaitan dengan proses pemberdayaan yang muncul dari dalam masyarakat dan terlepas dari pengaruh eksternal. Di sisi lain, eksogen berarti tumbuh atau berasal dari luar, memiliki sebab atau asal eksternal. Pendekatan eksogen menunjukkan bahwa pemangku kepentingan eksternal adalah mereka yang menjalankan kekuasaan dan pengembangan masyarakat bergantung pada eksternal, padahal pemangku kepentingan eksternal belum tentu kuat. Berdasar kewenangan dan pengelompokan *stakeholder* dalam PPIP, maka yang masuk dalam aktor endogen adalah *stakeholder* utama yaitu OMS dan KPP, sedangkan *stakeholder* kunci dan *stakeholder* penunjang masuk kedalam kelompok eksogen. Implementasi tahap PPIP dalam proses pemberdayaan model EPE dapat dilihat pada Gambar 3.

Dalam studi ini, dapat diamati dana dan dukungan dari fasilitator, tokoh masyarakat dan tim pelaksana kabupaten merupakan faktor kunci dalam proses pemberdayaan. Dengan mengikutsertakan masyarakat dalam tahap persiapan merupakan bentuk praktek pemberdayaan eksogen (fase 1). Seperti disajikan dalam Gambar 3, dapat dijabarkan bahwa fase pemberdayaan masyarakat pada kegiatan PPIP dimulai dari masyarakat mendapat informasi kegiatan saat sosialisasi desa, mengamati dan menilai kegiatan dan kemudian memutuskan apakah mau terlibat atau tidak. Setelah memutuskan untuk ikut terlibat, maka pada tahap

ini proses mentransfer kekuasaan dan tanggung jawab secara bertahap dari tim pelaksana kabupaten dan FM ke kelompok masyarakat yang berpartisipasi baru dimulai.

Pada tahap perencanaan, proses pemberdayaan dapat dilihat dari bagaimana FM dan kepala desa mendampingi dan memotivasi masyarakat untuk dapat mengidentifikasi masalah, menentukan jenis dan lokasi infrastruktur dan merumuskan prioritas kegiatan. Dukungan FM dalam mengajari

masyarakat untuk dapat menyusun rencana kerja masyarakat (RKM) sendiri hingga menghitung rencana anggaran biaya (RAB) yang dibutuhkan untuk pekerjaan infrastruktur yang mereka sepakati sangatlah besar. Di tahap ini, karena dilibatkan secara langsung dalam perencanaan program, masyarakat diberi kebebasan dalam menentukan jenis pekerjaan sendiri, masyarakat merasa menjadi bagian dari program dan menjadi bagian penting dalam program.



Gambar 3. Implementasi Tahap PPIP dalam Proses Pemberdayaan Model EPE

Adisasmita (2006) mengemukakan bahwa dengan adanya partisipasi atau keterlibatan langsung dari masyarakat penerima program pembangunan, maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat itu sendiri. Mulai munculnya partisipasi unsur endogen disini maka fase pada proses

pemberdayaan pada tahap ini pemberdayaan eksogen dengan dukungan endogen (fase 2).

Saat pelaksanaan fisik, proses pemberdayaan masyarakat semakin meningkat fasenya. Kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam hal ini OMS didukung untuk mengambil tanggung jawab dan pemegang kendali pelaksanaan

pembangunan. Masyarakat mulai bekerja secara kolektif dengan pengawasan dan monitoring oleh FM, konsultan manajemen kabupaten, timlak dan satker kabupaten.

Pada fase ini unsur endogen mulai tumbuh di samping praktek pendekatan eksogen. Bertambah kuatnya unsur endogen disini maka fase pada proses pemberdayaannya berubah menjadi pemberdayaan endogen yang menggabungkan dengan dukungan eksogen (fase 3).

Di negara berkembang, partisipasi masyarakat pada umumnya masih harus dimobilisasi melalui campur tangan pemerintah dalam mengupayakan kerja sama (Kusumatantya, 2013). Dalam PPIP fase 2 dan 3 sangatlah penting untuk menciptakan kerja sama dan sinergi yang baik antara kelompok *stakeholder*. Pemilihan jenis infrastruktur yang dibangun perlu dipilih dengan hati-hati, karena tidak setiap jenis infrastruktur benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan sesuai dengan kemauan masyarakat untuk dilibatkan. Kurangnya keterampilan unsur eksogen untuk memfasilitasi partisipasi dapat menyebabkan konflik. Gyan dan Ampomah (2016) mengemukakan bahwa konflik dan hubungan pemangku kepentingan, mempengaruhi keberhasilan program.

Fase 4 pemberdayaan endogen sangat dipengaruhi oleh proses pemberdayaan pada fase-fase sebelumnya. Transisi dari eksogen ke pemberdayaan endogen membutuhkan komitmen dan konsistensi berbagai aktor dalam menjalankan perannya selama proses pemberdayaan. Pada tahap pasca pelaksanaan fisik, peran dan tanggung jawab terhadap hasil infrastruktur terbangun bertumpu pada kelompok masyarakat dalam hal ini KPP tanpa pendampingan praktek eksogen. KPP diberi kepercayaan diri di kalangan masyarakat untuk bekerja secara kolektif untuk memelihara dan mengembangkan infrastruktur terbangun hasil program.

Berdasarkan pengamatan pada Desa Dukuhbenda, proses pemberdayaan berproses secara linier sesuai tahapannya (lihat Gambar 4). Proses mentransfer kekuasaan kepada masyarakat dilakukan secara konsisten oleh unsur eksogen yang terlibat hingga akhirnya unsur endogen

dapat bertambah kuat. Kondisi infrastruktur desa yang masih minim di Desa Dukuhbenda membuat masyarakat sangat antusias dengan adanya kegiatan PPIP. Kultur masyarakat pegunungan yang masih sangat kental dengan budaya gotong royong, serta homogenitas masyarakat yang sangat tinggi yakni 84,5% adalah petani, membuat masyarakat dengan mudah dimotivasi untuk terlibat dalam program.

Masyarakat berproses dari yang tadinya hanya diberi motivasi untuk terlibat dan menjadi bagian dari program, kemudian bersama-sama mengidentifikasi masalah dan menentukan prioritas jenis pekerjaan yang benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat itu sendiri, sampai akhirnya diberi tanggung jawab untuk melakukan pembangunan dengan pengawasan unsur eksogen. Hal ini sesuai dengan penjelasan Tohidi dan Jabbari (2012) bahwa dalam proses pemberdayaan perlu memperhatikan aspek-aspek penting yaitu rasa kompetensi, rasa otonomi, rasa efektifitas, rasa berharga dan rasa percaya agar proses pemberdayaan dapat berjalan sesuai harapan. Dengan penentuan infrastruktur yang sesuai kebutuhan, masyarakat dengan sukarela berpartisipasi dalam bentuk tenaga maupun material. Masyarakat berpartisipasi secara langsung pada proses pelaksanaan program, oleh karena itu tumbuh rasa kepemilikan terhadap infrastruktur yang mereka bangun. Terbukti setelah program berakhir, KPP tetap mampu bekerja dan memotivasi warga sekitar lokasi infrastruktur terbangun untuk memelihara dan melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan.

Namun, pemberdayaan endogen dalam hal ini kurang optimal, pemeliharaan hanya dilakukan dengan cara kerja bakti dan iuran yang sifatnya insidental saat dibutuhkan, tidak dilakukan iuran rutin untuk mendanai pemeliharaan tersebut. Perlu dilakukan penguatan kelembagaan agar pemberdayaan endogen dapat berkelanjutan, seperti disampaikan oleh (Ahmad, Yusof, & Abdullah, 2013) bahwa pemberdayaan berkaitan dengan menerima daya untuk bertindak melalui mekanisme partisipasi individu, jaringan komunitas, organisasi, dan lembaga. Oleh karena itu, adanya organisasi dan penguatan

kelembagaan sangat diperlukan agar keberlanjutan dapat dicapai.



Gambar 4. Proses Pemberdayaan di Desa Dukuhbenda

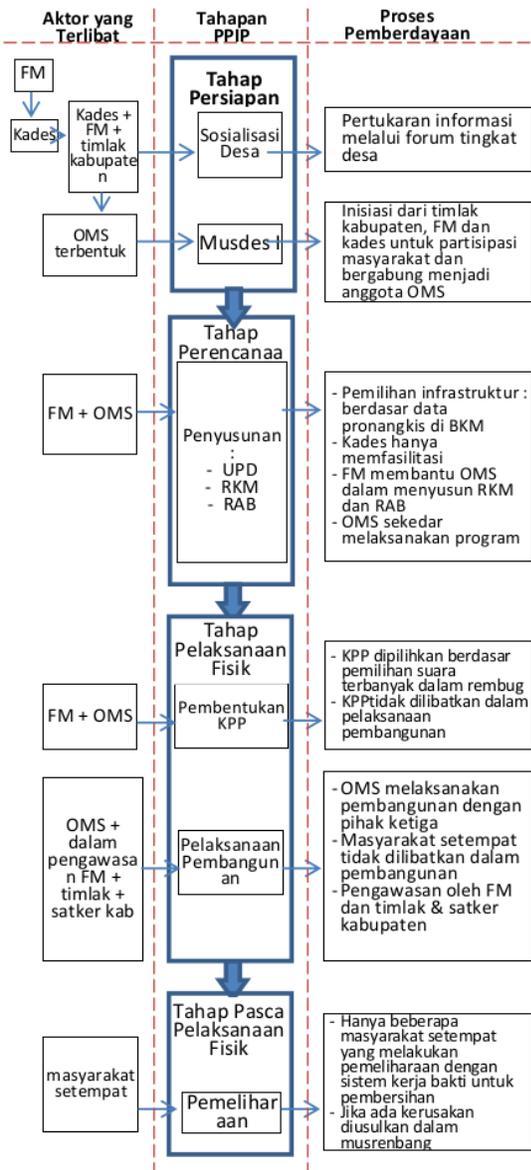
Berbeda dengan yang terjadi di Desa Slawi Kulon, proses pemberdayaan berproses tidak sesuai dengan tahapannya, ada beberapa tahap dimana proses pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya (lihat Gambar 5). Proses transfer

kekuasaan kepada masyarakat tidak dilakukan secara konsisten oleh unsur eksogen yang terlibat hingga akhirnya unsur endogen tidak dapat tumbuh kuat sesuai harapan. Berdasarkan hasil penelitian, sebagian besar masyarakat Slawi Kulon memiliki *mindset* bahwa urusan pembangunan infrastruktur murni menjadi tanggung jawab pemerintah, sehingga masyarakat tidak dapat membedakan program pemberdayaan dengan proyek yang berasal dari dana APBD dengan model kontraktual (dengan pihak ketiga), sehingga masyarakat lebih bersikap acuh terhadap program. Selain itu, kepala desa Slawi Kulon saat itu memasuki masa pensiun dan digantikan dengan pejabat sementara yang diambil dari PNS kabupaten yang berganti-ganti setiap beberapa waktu hingga sekarang. Hal ini menyebabkan kekedatan dan kepercayaan masyarakat terhadap kepala desa rendah.

Masyarakat Slawi Kulon cenderung heterogen yakni 25,6% pedagang, 20,4 % PNS, dan sisanya bergerak di bidang jasa pendidikan, industri, konstruksi, transportasi, kesehatan, akomodasi, perantara keuangan, listrik, pertanian dan lainnya. Hal ini membuat pengambilan keputusan relatif lebih sulit. Membaca situasi ini, OMS selaku penanggung jawab perencanaan dan pelaksanaan pembangunan lebih memilih tidak melibatkan warga secara langsung dalam perencanaan maupun pelaksanaan. Pada fase ini, aspek-aspek penting pemberdayaan tidak diperhatikan, sehingga rasa kepemilikan masyarakat terhadap hasil infrastruktur terbangun tidak tumbuh.

Praktek pemberdayaan pada fase 2 dan 3 di Desa Slawi Kulon, unsur endogen hanya berlaku untuk kelompok masyarakat saja dalam hal ini OMS, tidak sampai ke masyarakat lebih luas. Praktek endogen pada fase 2 dan 3 ini masih ada, namun sangat kecil. Dapat terlihat meskipun OMS berhasil menyelesaikan pembangunan infrastruktur, namun pada prosesnya tidak mengikutsertakan keterlibatan masyarakat justru menyerahkan pelaksanaan pembangunan pada pihak ketiga, sehingga tidak ada transfer pengetahuan dan keterampilan kepada masyarakat. Pada akhir program, pemberdayaan endogen tidak tercapai karena pemeliharaan tidak dilakukan. Unsur endogen masih bergantung pada

dukungan eksogen untuk melakukan pemeliharaan maupun perbaikan infrastruktur.



Gambar 5. Proses Pemberdayaan di Desa Slawi Kulon

4. KESIMPULAN

Proses pemberdayaan menunjukkan tahapan dalam mentransfer kekuasaan dari aktor eksternal (eksogen) untuk masyarakat lokal (endogen).

Pemberdayaan endogen berkaitan dengan proses pemberdayaan yang terlepas dari pengaruh eksternal yang muncul dari dalam masyarakat itu sendiri. Untuk mencapai pemberdayaan endogen, praktek pendekatan eksogen sangat diperlukan. Pendekatan eksogen menunjukkan bahwa *stakeholder* eksternal yang menjalankan kekuasaan dan masyarakat masih bergantung pada dukungan mereka.

Berdasarkan temuan penelitian di kedua lokasi penelitian, didapatkan bahwa proses pemberdayaan dalam kegiatan PPIP berproses secara linier, dimulai dari keterlibatan (*engage*), diikuti oleh partisipasi (*participate*), kemudian berkembang menjadi masyarakat yang berdaya (*empower*) sesuai proses pemberdayaan model EPE yang dikemukakan oleh Steiner dan Farmer (2017). Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa terdapat perbedaan proses pemberdayaan pada perdesaan di daerah pegunungan (Dukuhbenda) dengan perkotaan (Slawi Kulon). Pada Desa Dukuhbenda, proses pemberdayaan berproses secara linier sesuai tahapannya, fase pemberdayaan tidak terputus, sehingga pada akhir program dapat tercapai pemberdayaan endogen. Terbukti masyarakat tetap memelihara dan melakukan perbaikan bila terjadi kerusakan pada infrastruktur terbangun meskipun program telah berakhir. Sedangkan pada Desa Slawi Kulon, proses pemberdayaan berproses tidak sesuai dengan tahapannya, ada beberapa tahap dimana proses pemberdayaan tidak berjalan sebagaimana mestinya. Fase pemberdayaan terputus pada fase partisipasi, sehingga pada akhir program tidak tercapai pemberdayaan endogen.

Hal tersebut senada dengan yang dikemukakan oleh Steiner dan Farmer (2017), bahwa model EPE menyajikan proses pemberdayaan masyarakat secara linier, namun prosesnya dapat terputus pada fase-fasenya. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa terputusnya fase pemberdayaan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor tersebut adalah *mindset* masyarakat dan homogenitas masyarakat. Semakin homogen masyarakatnya proses pemberdayaan masyarakat relatif lebih mudah. Faktor lain yang mempengaruhi adalah konsistensi dukungan eksogen. Perlu adanya upaya menumbuhkan

semangat membangun di kalangan masyarakat terutama oleh tokoh yang berpengaruh dan dipercaya oleh masyarakat sehingga mereka tidak hanya berpartisipasi karena diminta, tetapi secara aktif mendorong keberhasilan program yang direncanakan.

Proses pemberdayaan dalam pembangunan infrastruktur berbasis pemberdayaan masyarakat tidak sama antara satu desa dan desa lainnya, bergantung pada karakteristik masyarakat dan kebutuhan masyarakat itu sendiri, sehingga program pemberdayaan masyarakat hendaknya tidak dipukul rata sama tiap desa. Penguatan kelembagaan pada kelompok masyarakat sangat dibutuhkan agar proses pemberdayaan berkelanjutan.

Hasil dari penelitian ini hanya terbatas pada program yang menjadi studi kasus dan program pemberdayaan sejenis dengan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) penanggungjawab yang sejenis pula, perbedaan OPD penanggungjawab program memungkinkan adanya perbedaan kebijakan yang berlaku. Selain itu, penulis hanya membandingkan dua desa yang mewakili desa di daerah pegunungan dan desa di daerah perkotaan sebagai sampel penelitian. Ke depannya, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi, perlu dilakukan penelitian untuk desa di daerah pesisir dan penelitian yang membandingkan antara program-program pemberdayaan lain guna mendapatkan penelitian yang lebih komprehensif.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Membangun Desa Partisipatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Ahmad, P., Yusof, F., & Abdullah, F. (2013). Local Economic Growth and Community Sustainability. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 101, 437-444. doi:10.1016/j.sbspro.2013.07.217
- Bradley, Q. (2014). Bringing Democracy Back Home: Community Localism and the Domestication of Political Space. *Environment and Planning D: Society and Space*, 32(4), 642-657. doi:10.1068/d17312
- Creswell, J. W. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Edisi ke 3*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Foster-Fishman, P. G., Pierce, S. J., & Van Egeren, L. A. (2009). Who Participates and Why: Building a Process Model of Citizen Participation. *Health Education & Behavior*, 36(3), 550-569. doi:10.1177/1090198108317408
- Gyan, C., & Ampomah, A. O. (2016). Effects of Stakeholder Conflicts on Community Development Projects in Kenyase. *SAGE Open*, 6(1). doi:10.1177/2158244016635254
- Iqbal, M. (2007). Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya dalam Pembangunan Pertanian. *Jurnal Litbang Pertanian*, 26(3), 89-99.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2014). *Pedoman Pelaksanaan PPIP*. Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kusumatantya, I. (2013). Peran Pemangku Kepentingan Dalam Pembentukan Komunitas Guna Mencapai Ketahanan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Wilayah dan Lingkungan*, 1(1), 33-48.
- Mansuri, G., & Rao, V. (2012). *Localizing Development: Does Participation Work? : The World Bank*.
- Mardikanto, T., & Soebiato, P. (2012). *Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Margarian, A. (2011). *Endogenous Rural Development: Empowerment or Abandonment*. Artikel di presentasikan di 4th International Summer Conference in Regional Science, Dresden.
- Skerratt, S., & Steiner, A. (2013). Working with Communities-of-Place: Complexities of Empowerment. *Local Economy*, 28(3), 320-338. doi:10.1177/0269094212474241
- Steiner, A. A., & Farmer, J. (2017). Engage, Participate, Empower: Modelling Power Transfer in Disadvantaged Rural Communities. *Environment and Planning C: Politics and Space*, 36(1), 118-138. doi:10.1177/2399654417701730

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta.

Tohidi, H., & Jabbari, M. M. (2012). The Aspects of Empowerment of Human Resources. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 31, 829-833. doi:10.1016/j.sbspro.2011.12.150

United Nations. (2008). *People Matter: Civic Engagement in Public Governance*. Diakses dari New York: <http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un/unpan028608.pdf>

4 Yin, R. K. (2014). *Studi Kasus Desain & Metode*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

PROSES PEMBERDAYAAN DENGAN MODEL EPE (ENGAGEMENT–PARTICIPATION– EMPOWERMENT) DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DESA DI KABUPATEN TEGAL

ORIGINALITY REPORT

7%

SIMILARITY INDEX

6%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

2%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

pt.scribd.com

Internet Source

2%

2

id.scribd.com

Internet Source

2%

3

docobook.com

Internet Source

1%

4

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

5

ml.scribd.com

Internet Source

1%

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On